



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNI KUSUMAWATI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 82268

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.380.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 565.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 105.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 80.300.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 53.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 7.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 5.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.473.050.000

III. HUTANG

Rp. 408.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.065.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.